BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ada persamaan dan perbedaan antara pandangan kiai pengasuh pondok pesantren di Bangkalan dengan pandangan KH. Sahal Mahfudh berkaitan dengan peran publik perempuan sebagai anggota legislatif. Mayoritas kiai pengasuh pondok pesantren di Bangkalan mempunyai pandangan yang sama dengan KH. Sahal Mahfudh, yaitu memperbolehkan perempuan menjadi anggota legislatif dengan argumentasi yang hampir sama pula, yaitu ayat al-Qur'an yang memerintahkan laki-laki dan perempuan untuk melakukan *amar-ma'ruf nahi munkar*, serta tidak ada larangan secara langsung dalam hadith, dengan syarat harus tetap menjaga etika-etika agama. Adapun perbedaannya, KH. Sahal Mahfudh secara tegas menjadikan *maslahah al-amma>h* sebagai salah satu basis pemikiran beliau, sedangkan kiai pengasuh pondok pesantren di Bangkalan tidak secara tegas menggunakan konsep *maslahah al-amma>h*. Perbedaan lain terletak pada tipologi pemikiran mereka. KH. Sahal Mahfudh termasuk kiai yang bercorak transformatif, KH. Nuruddin A. Rahman dan KH. Imam Buchori Cholil termasuk kiai yang bercorak realistik, sedangkan KH. Abdullah Chon Thabrani dan KH. Abdul Adzim Cholili termasuk kiai yang bercorak formalistik.
2. Ada kesesuaian antara pandangan mayoritas kiai pengasuh pondok pesantren di Bangkalan dengan pandangan KH. Sahal Mahfudh, yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperbolehkan perempuan menjadi anggota legislatif. Akan tetapi, dari argumentasi yang digunakan terlihat bahwa pandangan KH. Sahal Mahfudh lebih argumentatif, menggunakan kaidah us{ul al-fiqh, kaidah fiqh dan menggunakan konsep mas{lahah 'ammah, serta pikiran beliau terdokumentasi dalam kitab dan beberapa buku hasil karya tulis. Sedangkan pemikiran para kiai di Bangkalan belum terdokumentasi dalam bentuk karya tulis.

B. Saran

Hasil temuan peneliti tentang pandangan kiai pengasuh pondok pesantren di Bangkalan berkaitan dengan peran publik perempuan sebagai anggota legislatif terlihat bahwa pandangan mayoritas kiai pengasuh pondok pesantren yang memperbolehkan perempuan menjadi anggota legislatif berbeda dengan pandangan umum masyarakat Bangkalan, sehingga menyebabkan tingkat elektabilitas perempuan sebagai anggota legislatif sangat rendah. Oleh karena itu penulis memiliki beberapa saran di antaranya:

1. Perlu adanya sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat Bangkalan bahwa tidak ada larangan bagi perempuan menjadi anggota legislatif, sehingga dalam pemilu legislatif yang akan datang keterpilihan perempuan semakin meningkat
2. Perlu adanya karya tulis yang memuat hasil pemikiran kiai pengasuh pondok pesantren di Bangkalan tentang peran publik perempuan sebagai anggota legislatif, sehingga masyarakat Bangkalan lebih terbuka terhadap keberadaan anggota legislatif perempuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id